

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI KONSUMEN DALAM PENGHINDARAN PAJAK KONSUMSI

Jemi Sepriyanto, Ria Karina, Sukiantono Tang

Program Sarjana Akuntansi, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi Batam 29442

Email: jemisepriyanto17@gmail.com ria@uib.ac.id sukiantono.tang@uib.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to investigate the role of consumers in participating in consumption tax avoidance which explored the role of religiosity, attitudes towards government, and moral recognition. The independent variables in the study were religiosity, attitudes toward government, and moral recognition, while the dependent variable was consumption tax avoidance. The result of the research stated that religiosity had a negative impact on consumers to participate in consumption tax avoidance, where a high level of religiosity led consumers to be more obedient to tax payments. However, attitudes towards government had a negative impact on influencing consumers to participate in consumption tax avoidance, which was if consumer attitudes toward government were negative, then this study hypothesized that consumers participated in consumption tax avoidance. Moreover, moral recognition had a negative impact on influencing consumers to participate in consumption tax avoidance, a high level of morale was more compliant with tax payments. The results in this study indicated that religiosity, attitudes toward government, and moral recognition had significantly positive results on consumption tax avoidance.

Keywords: *Religiosity, Attitude towards government, Moral recognition, Consumption tax avoidance.*

1. PENDAHULUAN

Membangun suatu negara untuk kesejahteraan negara dapat dideterminasi dengan melihat kemampuan negara dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Cara mengetahui keberhasilan negara dalam membangun suatu negara yaitu salah satunya pendapatan negara, pajak merupakan suatu pendapat negara yang paling banyak membantu kontribusi. Armstrong *et al.* (2015) mendefinisikan pajak adalah suatu kewajiban kepada negara yang harus dipatuhi dan dipenuhi agar negara bisa melakukan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Penghindaran pajak konsumsi (CTE), menurut Srivastava *et al.* (2018) mendefinisikan CTE sebagai ketika seorang pembisnis dengan sengaja menggunakan suatu transaksi tunai dengan tidak memberikan nota kepada konsumen agar bisa menghindari kewajiban pajak, yang akan secara tidak langsung konsumen berpartisipasi terhadap CTE dalam kondisi sadar maupun tidak sadar ketika mereka melakukan pembayaran barang atau jasa secara tunai tanpa menerima nota. Menurut Culiberg dan Bajde (2014), penghindaran pajak konsumsi umumnya akan terjadi apabila seseorang dengan sengaja menggunakan suatu transaksi dengan secara tunai untuk menghindari pajak dengan melakukan transaksi tunai akan membantu mereka dalam melaporkan penghasilan ataupun pendapatan yang mereka peroleh akan lebih rendah dari pada yang mestinya mereka bayar.

Kirchler *et al.* (2008) mendefinisikan penghindaran pajak merupakan sebagai pengurangan jumlah pajak dengan mencari peluang celah pajak, sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan yang ilegal dengan melarikan diri dari pajak dan menyembunyikan semua transaksi. Dengan adanya penggelapan pajak maupun penghindaran pajak dapat memberikan suatu keuntungan pembisnis yang tidak efektif atau efisien bagi para pembisnis dengan membandingkan pembisnis yang melapor pajak atau mematuhi hukum perpajakan.

Tindakan penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak akan menyebabkan berkurangnya suatu pendapatan bagi pemerintah. Memperhitungkan dampak yang diperoleh dari penghindaran pajak atau ketidakpatuhan terhadap masyarakat, beberapa penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi tindakan penghindaran pajak. Culiberg dan Bajde (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan identifikasi sebagai masalah moral. Studi ini memahami tentang ketika proses dari suatu pengambilan keputusan konsumen yang berkaitan dengan penghindaran pajak konsumsi yang berhubungan dengan sikap konsumen terhadap tindakan pemerintah, religiusitas, dan pengakuan moral. Penelitian ini berfokus dengan tindakan kontribusi yang dieksplorasi dari peran konsumen sebagai pihak ketiga terhadap penghindaran pajak oleh pedagang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penghindaran Pajak

Pajak memiliki pengertian di dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang berisi tentang suatu kewajiban warga kepada negara yang harus ditaati atas segala aturan maupun individual atau suatu organisasi dengan bersifat memaksa serta melakukan penerapan sesuai dengan peraturan undang-undang, dan tidak memberikan manfaat yang bersifat menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dan pengertian perpajakan juga terdapat berbagai komponen antara lain:

1. Pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dipenuhi untuk masyarakat.
2. Pajak memiliki sifat yang memaksa.
3. Pajak dilaksanakan sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintah.
4. Pajak tidak memberikan imbalan langsung.

Menurut Gallemore dan Labro (2015) penghindaran pajak dipengaruhi oleh tingkat kemampuan perusahaan dari suatu kualitas lingkungan informasi internal perusahaan. Kualitas lingkungan informasi internal dalam

perusahaan sangat memainkan peran penting terhadap penghindaran pajak. Tingkat kualitas lingkungan informasi internal yang tinggi dapat mempengaruhi proses dalam tingkat kepatuhan pajak dengan dapat ditangani secara cepat dan efektif.

Menurut Jones dan Rhoades (2012) dalam perpajak terdapat dua kasus yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat beberapa perbedaan diantara kedua ini yaitu, penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang digunakan dengan secara hukum untuk mengurangi dalam pelaporan kewajiban pajak seseorang dalam memanfaatkan ketentuan pajak itu sendiri. Sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan yang secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan dari kewajiban pajak yang semestinya wajib dibayar.

Beebeejaun (2017) menjelaskan bahwa penghindaran pajak memiliki arti sangat luas sehingga penghindaran pajak terbagi menjadi dua bentuk penghindaran diantaranya penghindaran pajak yang diizinkan dengan penghindaran pajak tidak diizinkan yang telah ditentukan dengan aturan hukum yang berlaku. Penghindaran pajak yang tidak diizinkan merupakan tindakan ilegal yang dapat dikatakan yaitu melanggar hukum perpajakan, sedangkan penghindaran pajak diizinkan yaitu tindakan legal yang dapat dikurangi atas pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.2.1 Religiusitas Memiliki Pengaruh Negatif bagi Konsumen untuk Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak Konsumsi (CTE)

Religiusitas didefinisikan secara sederhana dalam Sukmana *et al.* (2018) sebagai kondisi mempercayai kekuatan yang maha luar biasa yang dapat mengatur segalanya, yaitu kepada Tuhan yang wajib untuk dipatuhi, dipercayai dan disembah. Religiusitas didefinisikan sebagai sejauhmana seseorang menganutnya nilai-nilai agama, kepercayaan dan praktik

menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari (Worthington *et al.*, 2003). Menurut Jalili (1993) agama telah menyatakan bahwa seseorang yang taat kepada Tuhan maka akan wajib dalam membayar pajak.

Religiusitas telah dipelajari secara luas dalam konteks perilaku konsumen yang diteliti oleh (Bailey & Sood, 1993). ditemukan bahwa orang yang sangat religius cenderung mengikuti doktrin dan/atau ajaran agamanya lebih dekat dan juga mematuhi aturan dan kode etik yang ditetapkan oleh doktrin agama yang akan positif mempengaruhi perilaku membayar pajak (Swimberghe *et al.*, 2011). Kami menemukan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi, yang berarti bahwa konsumen yang mendapat skor tinggi pada konstruk religiusitas akan menunjukkan niat yang lebih rendah untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi.

H1: Religiusitas memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi.

2.2.2 Sikap Terhadap Pemerintah Memiliki Pengaruh Negatif bagi Konsumen untuk Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak Konsumsi

Belmonte *et al.* (2018) menjelaskan pemerintah merupakan suatu aturan yang dimaksudkan sebagai proses desentralisasi pemerintah di mana pelimpahan sumber daya berjalan seiring dengan pemindahan politik dan tanggung jawab. Kami membawa konsumen kedalam pemerintahan dan bisnis. Di sini konsumen tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintah dan juga secara hukum tidak diwajibkan membayar pajak, penjuallah yang bertanggung jawab dalam membayar pajak. Namun demikian konsumen berpartisipasi dalam penghindaran pajak ini dengan tidak mengambil tanda terima atas pembelian tunainya secara sadar atau tidak. Maka konsumen sama-sama bertanggung jawab atas penghindaran pajak tersebut. Dalam konteks penelitian kami, kami tertarik untuk

mengetahui dampak dari konsumen sikap terhadap pemerintah. Jika sikap konsumen terhadap pemerintah positif, kami berhipotesis bahwa konsumen akan menghindari berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi. Sikap positif terhadap pemerintah akan meningkatkan niat konsumen untuk terlibat dalam perilaku patuh pajak.

Dan pada penelitian ini menyatakan bahwa jika konsumen mendapatkan manfaat cocok dengan cara berpartisipasi dari penghindaran pajak konsumsi, konsumen tidak akan melepaskan manfaat tersebut ketika sikapnya terhadap pemerintah. Bahkan ketika konsumen tidak mendapatkan manfaat apapun sesuai dengan keikutsertaan dalam penghindaran pajak konsumsi, mereka masih akan terus melakukan hal yang berdampak merugikan pemerintah. Jadi bahkan ketika seorang konsumen mengakui bahwa partisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi itu tidak etis, ia akan terus melakukan hal itu terhadap pemerintah.

H2: Sikap terhadap pemerintah memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi.

2.2.3 Pengakuan Moral Memiliki Pengaruh Negatif bagi Konsumen untuk Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak Konsumsi

Menurut Mahmudi dan Kusmuriyanto (2014) pengakuan moral merupakan sikap dan sifat responden dalam aspek sikap dan kejujuran dari responden. Serta berkaitan erat dengan pendukung latarbelakang seseorang dalam pengambilan keputusan mengenai aktifitas yang direncanakannya. Pada penelitian ini menyatakan bahwa pengakuan moral memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi, yang di mana jika pengakuan moral bersifat negatif maka konsumen akan lebih taat terhadap pembayaran pajak.

H3: Pengakuan moral memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini menggunakan data kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian murni (*pure research*) untuk melakukan tujuan dari pengujian teori, yang digunakan sebagai praktik di lapangan yang bersifat opsional (Sukmadinata, 2009). Penelitian ini menggunakan sifat kausal komparatif, untuk membandingkan suatu periode yang berbeda dengan mencari sebab-akibat antara hubungan dua variabel maupun lebih atau suatu objek penelitian dengan subjek yang berbeda (Marzuki, 2009).

Target objek penelitian ini yaitu mahasiswa dan/atau mahasiswi akuntansi. Sampel yang dikumpulkan adalah mahasiswa dan/atau mahasiswi akuntansi yang aktif di enam universitas yang terdaftar di kota Batam diantaranya Universitas Internasional Batam (UIB), Universitas Putera Batam (UPB), Universitas Universal, Universitas Batam (UNIBA), Politeknik Negeri Batam, dan Universitas Riau Kepulauan.

Kuesioner ini akan disebarakan kepada mahasiswa dan/atau mahasiswi yang ada di enam universitas yang terdaftar di kota Batam diantaranya Universitas Internasional Batam (UIB), Universitas Putera Batam (UPB), Universitas Universal, Universitas Batam (UNIBA), Politeknik Negeri Batam, dan Universitas Riau Kepulauan. Pembagian sampel akan dilakukan pada tanggal 05 April 2020 hingga 08 Juni 2020. Sampel yang diambil melalui website forlap dikti yang menunjukkan mahasiswa dan/atau mahasiswi akuntansi tahun 2019 hingga 2020 yang aktif di enam universitas yang terdaftar di kota Batam ini berjumlah 3,139 dengan menggunakan rumus slovin maka target penyebarannya sebanyak 354 sampel.

3.1 Penghindaran Pajak Konsumsi

Culiberg dan Bajde (2014) mengartikan bahwa penghindaran pajak konsumsi biasanya dilakukan dengan pembayaran transaksi dengan secara tunai tanpa menerima tanda terima. Transaksi

tunai tanpa tanda terima akan membantu pelapor pajak membayar kewajiban pajaknya lebih sedikit dari pada seharusnya yang dibayar.

Metode pengukuran untuk mengukur penghindaran pajak konsumsi terhadap pajak menggunakan pernyataan kuesioner yang diadaptasi dari (Culiberg & Bajde, 2014). Pernyataan kuesioner dinilai dengan menggunakan 1 hingga 5 poin skala *likert* (1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju). Jika mengisi 5 maka responden orang yang kontra terhadap penghindaran pajak konsumsi.

3.2 Religiusitas

Delener (1990) menjelaskan bahwa religiusitas atau juga disebut dengan agama ialah seseorang yang menganut atau memegang keyakinan terhadap nilai-nilai dari agama tertentu yang telah dipercayai dan mempraktikkan ajaran-ajaran agama tersebut. Metode pengukuran untuk mengukur religiusitas menggunakan pernyataan kuesioner yang diadaptasi dari (Worthington *et al.*, 2003). Pernyataan kuesioner dinilai dengan menggunakan 1-5 poin skala *likert* (1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju). Jika mengisi poin 5 maka berarti responden religius.

3.3 Sikap Terhadap Pemerintah

Belmonte *et al.* (2018) pemerintah merupakan suatu aturan yang dimaksudkan sebagai proses desentralisasi pemerintah di mana pelimpahan sumber daya berjalan seiring dengan pemindahan politik dan tanggung jawab. Menurut Johnson dan Meder (2012) fungsi utama dari pemerintah yaitu untuk melindungi masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Metode pengukuran untuk mengukur sikap terhadap pemerintah menggunakan pernyataan kuesioner yang diadaptasi dari (Alm & Torgler, 2005). Pernyataan kuesioner dinilai dengan menggunakan 1-5 poin skala (1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5

sangat setuju). Jika mengisi 5 maka responden orang yang tidak taat kepada pemerintah.

3.4 Pengakuan Moral

Mansouri (2007) menjelaskan bahwa moral meliputi bimbingan dan penjelasan, individu yang telah menerima bimbingan akan menerapkan prinsip moral yang telah mendasar ketika mereka mengambil keputusan sedangkan penjelasan digunakan sebagaimana kepercayaan mereka apakah benar secara etis dan apakah keyakinan mereka tidak sesuai dengan pembenaran moral yang mendasarinya. Metode pengukuran untuk mengukur pengakuan moral menggunakan pernyataan kuesioner yang diadaptasi dari (Singhapakdi *et al.*, 1996). Pernyataan kuesioner dinilai dengan menggunakan 1-5 poin skala *likert* (1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju). Jika memilih poin 5 maka responden dikatakan bermoral.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Responden

Analisis pada penelitian dengan menggunakan cara penyebaran kuesioner yang dilaksanakan dengan penyebaran melalui google form terhadap mahasiswa dan/atau mahasiswi akuntansi di enam universitas yang terdaftar di kota Batam, diantaranya Universitas Putera Batam, Universitas Batam, Universitas Riau Kepulauan, Universitas Universal, Politeknik Negeri Batam, dan Universitas Internasional Batam. Kuesioner pada penelitian terdapat pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel yang diuji dan identitas responden. Ringkasan proses pengumpulan data dan pemilihan sampel dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Proses Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel

| Keterangan | Jumlah Kuesioner |
|---------------------------|------------------|
| Kueioner disebarkan | 400 Responden |
| Data Outlier | 20 Responden |
| Jumlah data yang diteliti | 380 Responden |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Dari Tabel 4.1 menjelaskan bahwa terdapat penyebaran kuesioner berjumlah 400 responden dan terdapat data *outlier* berjumlah 20 responden maka hasil jumlah data yang akan diteliti yaitu berjumlah 380 responden. Dan identitas responden dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Identitas Responden

| Keterangan | Kriteria | Frekuensi | Persentase |
|----------------------|-----------------------|-----------|------------|
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 178 | 44,5% |
| | Perempuan | 222 | 55,5% |
| Usia | < 18 tahun | 0 | 0% |
| | 19-20 tahun | 246 | 61,6% |
| | 21-22 tahun | 143 | 35,7% |
| | > 23 tahun | 11 | 2,7% |
| Asal Universitas | UIB | 86 | 21,5% |
| | UPB | 131 | 32,8% |
| | UNIBA | 31 | 7,8% |
| | UNRIKA | 77 | 19,3% |
| | Universitas Universal | 25 | 6,3% |
| | Politeknik | 50 | 12,3% |
| | Perkerja swasta | 296 | 74% |
| Status Pekerjaan | Wirasaha | 104 | 26% |
| | < Rp3jt | 26 | 6,5% |
| | Rp3jt-Rp5jt | 315 | 78,8% |
| Penghasilan Perbulan | Rp5jt-10jt | 55 | 13,7% |
| | > Rp10jt | 4 | 1% |
| | Npwp | 147 | 36,7% |
| | Tidak ada | 253 | 63,3% |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Hasil dari penyebaran kuesioner ini menyatakan bahwa jumlah responden sebanyak 222 atau 55,5% dari hasil keikutsertaan responden yaitu berjenis kelamin perempuan. Dan kebanyakan dalam responden ini berusia 19-20 tahun, dan terdapat responden paling banyak dari Universitas Putera Batam yaitu 131 mahasiswa dan/atau mahasiswi, status pekerjaan dari responden mayoritas yaitu pekerja swasta sebanyak 296 responden, penghasilan dari responden yang paling banyak yaitu Rp3jt-Rp5jt perbulannya, dan hasil responden yang terdapat banyak yang tidak memiliki npwp yaitu 253 responden atau 63,3% dari hasil penyebaran kuesioner.

4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif yaitu menguji variabel penelitian yang terdapat pernyataan-pernyataan yang mendukung masing-masing variabel. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan religiusitas, pengakuan moral, sikap terhadap pemerintah, dan penghindaran pajak konsumsi. Kuesioner tersebut terbagi menjadi 30 pernyataan yaitu pernyataan mengenai variabel independen antara lain 10 pernyataan mengenai religiusitas, 10 pernyataan mengenai pengakuan moral, 5 pernyataan mengenai sikap terhadap pemerintah, dan 5 pernyataan untuk variabel dependen yaitu penghindaran pajak konsumsi. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat di Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Standar Deviasi |
|--------------|-----|---------|----------|-----------|-----------------|
| Religiusitas | 380 | 1 | | 5 4,24 | 0,723 |
| Pengakuan | 380 | 1 | | 5 4,30 | 0,682 |
| Sikap Terha | 380 | 1 | | 5 4,28 | 0,669 |
| Penghindar | 380 | 1 | | 5 4,30 | 0,653 |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Pada kuesioner tersebut diharapkan atas penilaian dari responden mengenai pandangan responden terhadap religiusitas, pengakuan moral, sikap terhadap pemerintah dan penghindaran pajak konsumsi dengan menggunakan nilai dari 1-5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju.

Variabel religiusitas, pengakuan moral, sikap terhadap pemerintah, dan penghindaran pajak konsumsi mempunyai nilai minimum 1 dan maksimum 5. Nilai rata-rata yang dihasilkan variabel religiusitas sebesar 4,24. Nilai ini menunjukkan hasil rata-rata mahasiswa dan/atau mahasiswi yang mengisi kuesioner ini memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Dan terdapat nilai standar deviasi sebesar 0,723. Data yang mempunyai nilai data variasi yang tinggi apabila data tersebut memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar dari 33% dari nilai rata-ratanya (Santoso, 2011). Dan pada hasil uji penelitian ini terdapat nilai standar deviasi sebesar 17,05% dari nilai rata-ratanya. Maka dari hasil uji tersebut menyatakan bahwa variasi data pada variabel religiusitas dinyatakan tidak terlalu tinggi.

Nilai rata-rata yang dihasilkan variabel pengakuan moral sebesar 4,30. Nilai

ini menunjukkan hasil rata-rata mahasiswa dan/atau mahasiswi memiliki tingkat pengakuan moral yang tinggi. Dan terdapat nilai standar deviasi sebesar 0,682. Dan pada hasil uji penelitian ini terdapat nilai standar deviasi sebesar 15,86% dari nilai rata-ratanya. Maka dari hasil uji tersebut menyatakan bahwa variasi data pada variabel pengakuan moral dinyatakan tidak terlalu tinggi.

Nilai rata-rata yang dihasilkan variabel sikap terhadap pemerintah sebesar 4,28. Nilai ini menunjukkan hasil rata-rata mahasiswa dan/atau mahasiswi tidak taat kepada aturan pemerintah. Dan terdapat nilai standar deviasi sebesar 0,669. Dan pada hasil uji penelitian ini terdapat nilai standar deviasi sebesar 15,63% dari nilai rata-ratanya. Maka dari hasil uji tersebut menyatakan bahwa variasi data pada variabel sikap terhadap pemerintah dinyatakan tidak terlalu tinggi.

Nilai rata-rata yang dihasilkan variabel penghindaran pajak konsumsi sebesar 4,30. Nilai ini menunjukkan hasil rata-rata mahasiswa dan/atau mahasiswi memiliki tingkat kontra yang tinggi terhadap penghindaran pajak konsumsi. Dan terdapat nilai standar deviasi sebesar 0,653. Dan pada hasil uji penelitian ini terdapat nilai standar deviasi sebesar 15,18% dari nilai rata-ratanya. Maka dari hasil uji tersebut menyatakan bahwa variasi data pada variabel penghindaran pajak konsumsi dinyatakan tidak terlalu tinggi.

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini yang terdapat 30 pernyataan dari variabel religiusitas, pengakuan moral, sikap terhadap pemerintah, dan penghindaran pajak konsumsi. Hasil dari uji validitas pada masing-masing variabel dinyatakan *valid* apabila memiliki nilai faktor lebih besar dari 0,30 (Azwar, 2011). Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Nilai Korelasi | Kesimpulan |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Religiusitas 1 | 0,638 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 2 | 0,617 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 3 | 0,625 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 4 | 0,566 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 5 | 0,639 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 6 | 0,614 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 7 | 0,647 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 8 | 0,618 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 9 | 0,601 | <i>Valid</i> |
| Religiusitas 10 | 0,609 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 1 | 0,611 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 2 | 0,649 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 3 | 0,704 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 4 | 0,675 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 5 | 0,669 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 6 | 0,573 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 7 | 0,649 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 8 | 0,665 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 9 | 0,699 | <i>Valid</i> |
| Pengakuan Moral 10 | 0,639 | <i>Valid</i> |
| Sikap Terhadap Pemerintah 1 | 0,791 | <i>Valid</i> |
| Sikap Terhadap Pemerintah 2 | 0,760 | <i>Valid</i> |
| Sikap Terhadap Pemerintah 3 | 0,721 | <i>Valid</i> |
| Sikap Terhadap Pemerintah 4 | 0,743 | <i>Valid</i> |
| Sikap Terhadap Pemerintah 5 | 0,766 | <i>Valid</i> |
| Penghindaran Pajak Konsumsi 1 | 0,792 | <i>Valid</i> |
| Penghindaran Pajak Konsumsi 2 | 0,783 | <i>Valid</i> |
| Penghindaran Pajak Konsumsi 3 | 0,785 | <i>Valid</i> |
| Penghindaran Pajak Konsumsi 4 | 0,660 | <i>Valid</i> |
| Penghindaran Pajak Konsumsi 5 | 0,656 | <i>Valid</i> |

Sumber: Data yang diolah (2020)

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keunggulan dari data penelitian. Dalam tahap pengujian reliabilitas ini data yang diukur yaitu dari nilai *cronbach's alpha* terhadap masing-masing variabel. Data dapat dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *cronbach's alpha* yang bernilai 0,6 ataupun

lebih. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menyatakan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel bernilai lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan masing-masing variabel yaitu religiusitas, pengakuan moral, sikap terhadap pemerintah, dan penghindaran pajak konsumsi dinyatakan *reliable*. Hasil reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Kesimpulan |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Religiusitas | 0,819 | Reliabel |
| Pengakuan Moral | 0,851 | Reliabel |
| Sikap Terhadap Pemerintah | 0,813 | Reliabel |
| Penghindaran Pajak Konsumsi | 0,789 | Reliabel |

Sumber: Data yang diolah (2020)

4.3 Hasil Uji Outlier

Montgomery dan Peck (1992) menjelaskan bahwa uji *outlier* apabila dikatakan *outlier* maka memiliki nilai *SDR* lebih kecil dari 1,96 dan lebih besar dari 1,96. Dari hasil pengujian pada penelitian ini berjumlah 400 responden dan terdapat data *outlier* berjumlah 20 responden maka hasil jumlah data yang akan diteliti yaitu berjumlah 380 responden.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunakan nilai *Kolmogorov Smirnov*. Apabila terdapat nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan data tidak menyebar secara normal dan apabila data memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dapat dinyatakan penyebaran data secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini yaitu pengaruh religiusitas, sikap terhadap pemerintah, dan pengakuan moral terhadap penghindaran pajak konsumsi yang menyatakan nilai signifikan sebesar 0,798 maka dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini menyebar secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

| Variabel Dependen | Nilai Signifikansi | Kesimpulan |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Penghindaran Pajak Konsumsi | 0,798 | Normal |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yang menggunakan *variance inflation factor* (VIF). Uji multikolinearitas mempunyai kriteria pengujiannya dengan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari hasil uji pada penelitian ini nilai VIF menunjukkan lebih kecil dari 10, maka dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian ini. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | VIF | Kesimpulan |
|--|-------|---------------------------------|
| Religiusitas Terhadap CTE | 2,861 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| Sikap Terhadap Pemerintah Terhadap CTE | 2,703 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| Pengakuan Moral Terhadap CTE | 3,304 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yang menggunakan uji *Glejser* pada variabel independen religiusitas, pengakuan moral, sikap terhadap pemerintah terhadap variabel dependen penghindaran pajak konsumsi. Dari hasil uji menyatakan bahwa variabel pada penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Nilai Signifikansi | Kesimpulan |
|--|--------------------|-----------------------------------|
| Religiusitas Terhadap CTE | 0,792 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Sikap Terhadap Pemerintah Terhadap CTE | 0,177 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Pengakuan Moral Terhadap CTE | 0,383 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji F

Uji F yaitu uji data dalam mengetahui apakah terdapat hubungan antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Nilai signifikan pada uji F yaitu kecil dari 0,05. Hasil uji F terhadap penelitian ini memiliki nilai signifikan kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel religiusitas, sikap terhadap pemerintah, dan pengakuan moral secara keseluruhan dalam mempengaruhi

variabel dependen yaitu penghindaran pajak konsumsi. Hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji F

| Variabel Dependen | Sig. | Kesimpulan |
|-----------------------------|-------|------------|
| Penghindaran Pajak Konsumsi | 0,000 | Signifikan |

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

4.5.2 Uji t

Uji t yaitu uji data yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Variabel independen akan terbukti apabila memiliki efek yang signifikan dengan angka yang dihasilkan berada di bawah 0,05, dan sebaliknya. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji t

| Variabel | Koefisien | Sig. | Kesimpulan | Hipotesis |
|--|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Religiusitas Terhadap CTE | 0,092 | 0,000 | Signifikan Positif | Terbukti |
| Sikap Terhadap Pemerintah Terhadap CTE | 0,482 | 0,000 | Signifikan Positif | Terbukti |
| Pengakuan Moral Terhadap CTE | 0,145 | 0,000 | Signifikan Positif | Terbukti |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Pada Tabel 4.10 menyatakan bahwa hasil variabel independen religiusitas, sikap terhadap pemerintah, dan pengakuan moral terdapat hubungan signifikan positif terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak konsumsi. Dilihat dari hasil signifikan yang lebih kecil dari 0,05.

Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yaitu religiusitas memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi. Hasil dari uji data pada penelitian ini menyatakan signifikan positif yang artinya bahwa konsumen yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi pada dirinya maka cenderung mengikuti doktrin dan/atau ajaran agamanya lebih dekat dan juga mematuhi aturan dan kode etik yang ditetapkan oleh doktrin agama yang akan positif mempengaruhi perilaku membayar pajak, yang di mana konsumen tidak akan berpartisipasi dalam tindakan penghindaran pajak konsumsi. Penelitian ini juga konsisten dengan Tanno dan Putri (2019), Boone *et al.* (2013), dan Benk *et al.*

(2016). Maka, hipotesis pertama ini didukung.

Hipotesis kedua yaitu sikap terhadap pemerintah memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi. Hasil dari uji data pada penelitian ini menyatakan bahwa signifikan positif yang berarti bahwa konsumen tidak taat terhadap pemerintah yang berdampak akan melakukan tindakan berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi. Yang di mana jika konsumen mendapatkan manfaat ataupun keuntungan dalam berpartisipasi, konsumen tidak akan melepaskan manfaat ataupun keuntungan tersebut yang berhubungan dengan pemerintah. Dikarenakan konsumen cenderung berpikir bahwa pemerintah tidak melakukan kewajibannya dan tidak terlihat hasil dari pemungutan pajak setelah membayar pajak. Penelitian ini juga konsisten dengan Anggraini dan Oliver (2019) dan Huang *et al.* (2016). Maka, hipotesis kedua ini didukung.

Hipotesis ketiga yaitu pengakuan moral memiliki pengaruh negatif bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi. Hasil dari uji data pada penelitian ini menyatakan signifikan positif yang mana moral merupakan sikap dan sifat responden dalam aspek sikap dan kejujuran dari responden yang di mana jika konsumen yang bermoral akan cenderung lebih mengetahui tindakan yang benar dan yang salah sehingga konsumen yang bermoral akan lebih taat terhadap aturan-aturan perpajakan. Maka dari hipotesis ini konsumen yang bermoral tidak akan melakukan tindakan berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi. Penelitian ini juga konsisten dengan Torgler (2003) dan Cahyonowati (2011). Maka, hipotesis ketiga ini didukung.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi yaitu uji dalam mengetahui tingkat kemampuan variabel independen untuk menjelaskan dan mewakili variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-square*)

| Model Regresi | Adjusted R-square |
|-----------------------------|-------------------|
| Penghindaran Pajak Konsumsi | 0,762 |

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Hasil Tabel 4.11 menyatakan bahwa hasil uji *Adjusted R-square* organisasi sebesar 76,2% artinya variabel religiusitas, sikap terhadap pemerintah, dan pengakuan moral dapat menjelaskan penghindaran pajak konsumsi sebesar 76,2% dan 23,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model ini, diantaranya wajib pajak (Frey dan Torgler, 2004), dan modal sosial (Chircop *et al.*, 2018).

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini yaitu untuk memahami pengaruh hubungan variabel independen antara lain religiusitas, sikap terhadap pemerintah, dan pengakuan moral terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak konsumsi. Hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas, sikap terhadap pemerintah, dan pengakuan moral terhadap penghindaran pajak konsumsi bersignifikan positif. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hipotesis pertama, kedua, dan ketiga di mana religiusitas, sikap terhadap pemerintah, dan pengakuan moral akan negatif dalam pengaruh konsumen untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak konsumsi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Target penelitian yang digunakan adalah mahasiswa dan/atau mahasiswi akuntansi di universitas di kota Batam, sehingga menghasil keterbatasan penyebaran kuesioner yang tidak dapat diwakilkan oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di universitas di luar kota Batam.
2. Mahasiswa dan/atau mahasiswi banyak sekali yang kurang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner.

5.3 Rekomendasi Penelitian

Terdapat rekomendasi dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Memperluas penyebaran sampel terhadap semua jurusan universitas agar penyebaran kuesioner lebih cepat dan lebih maksimal.
2. Memperluas jangkauan penyebaran wilayah penelitian agar mendapatkan sampel yang lebih maksimal dan dapat diandalkan.